



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. TAUFIQ MZ
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 631779

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	955.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 955.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	541.000.000
1. MOTOR, PIAGIO VESPA/LIBERTY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 ESP CBS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	295.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.858.000.000
III. HUTANG	Rp.	104.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.754.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJAT SUDRAJAT
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 668502

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 119.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m²/24.5 m² di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m²/15 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m²/10 m² di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 72.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2PV SEPEDA MOTOR Tahun 2015, LAINNYA Rp. 15.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI L 300 /2500 SOLAR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 52.614.642

F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000

Sub Total Rp. 303.614.642

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 303.614.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG DWYTOMO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **976963**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **576.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 21.75 m²/21.75 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 288.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21.75 m²/21.75 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 288.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **15.900.000**

1. MOTOR, YAMAHA 5 TL MIO AL CW S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA C1M02N42L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 11.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **34.496.300**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **42.824.565**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **669.220.865**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **669.220.865**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENI LESTARI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 827568

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 696.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/9.4 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 560.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 14.2 m2/19.23 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 136.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.500.000

1. MOTOR, HONDA ACH1M21B04A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 134.625.257

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 845.775.257

III. HUTANG Rp. ----

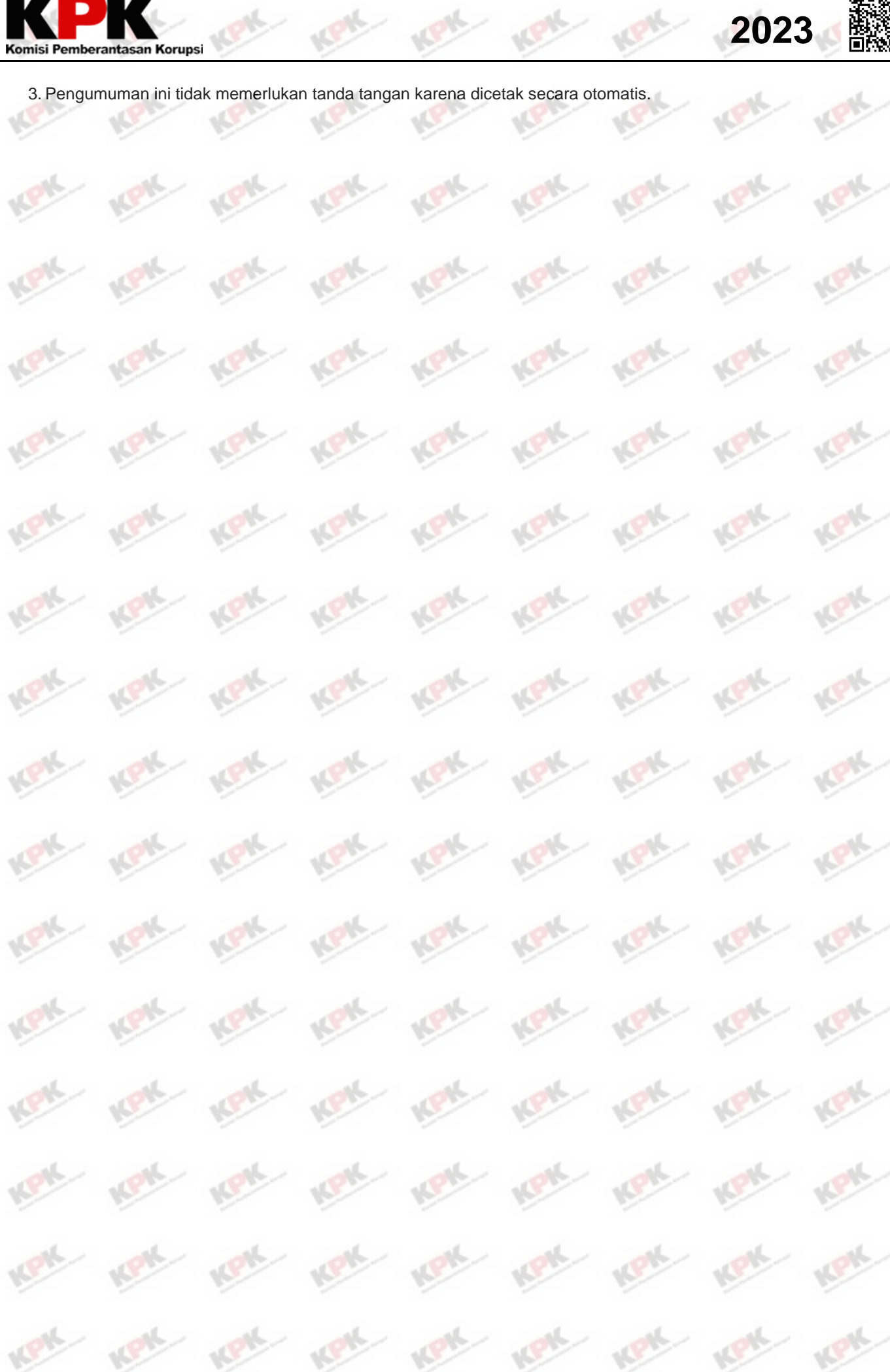
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 845.775.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DINA KURINIA SARI UTAMI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 735069

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.090.000.000

1. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/250 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS / MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.301.000.000

III. HUTANG Rp. 475.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 826.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.